

KESELARASAN KEBIJAKAN BERBASIS DATA MAKRO DAN KEBUTUHAN RIIL KELOMPOK TANI: STUDI KASUS KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

Muh. Hilal Hamdi¹, Alwi², Dandi³, Muhammad Ikbal Ali⁴

¹Universitas Hasanuddin, Indonesia

²Universitas Hasanuddin, Indonesia

³Universitas Hasanuddin, Indonesia

⁴Universitas Graha Edukasi Makassar, Indonesia

Correspondence: muhhilalhamdisap@gmail.com

Article Info

Article history:

Received

Aug 19th, 2026

Revised

Aug 27th, 2026

Accepted

Sep 7th, 2026

Keyword:

Macro-Based Data Policy; Real Needs of Farmer Groups; Women's Farmer Groups; Food Security; Participatory Governance.

ABSTRACT

This study aims to analyze the alignment between macro-based data policies and the real needs of farmer groups in food security in North Kolaka Regency. The study uses a qualitative approach with a case study design, collecting data through in-depth interviews, observations, and document analysis involving the Food Security Office, the Office of Food Crops and Horticulture, Field Agricultural Extension Officers (PPLs), the heads of farmer groups, and Women's Farmer Groups. This allows for an in-depth analysis of food security policies based on macro data and the actual needs of farmer groups in North Kolaka. This approach also highlights the misalignment between macro data-based planning and the real needs of farmer groups in North Kolaka. PPH, FSVA, and Price Panel data determine target locations, but they are not yet able to map out precise interventions. The P2L Program and Food Insecurity Handling Program have less economic impact in a relatively short time, unlike the successful red onion program that boosted production through quick financial incentives. Future planning must integrate macro data with the real, participatory needs of farmer groups. This study contributes by offering a framework for integrating macro data with collaborative and participatory approaches with farmer groups to address the biases of centralized planning in regional food security policies.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan masih menghadapi ancaman krisis pangan yang melanda dunia (Zhang et al., 2022). Di Indonesia arah kebijakan ketahanan pangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang melibatkan lintas sektor untuk mewujudkan ketersediaan, stabilitas, dan kualitas pangan (Seftiyana & Alwi, 2024). Namun, berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) 2023, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia masih berada di peringkat ke-63 dari 113 negara dengan skor 60,2, di bawah rata-

rata global, dengan indikator ketersediaan pasokan, kualitas, dan keberlanjutan pangan yang masih dinilai lemah (Pransuamitra, 2023).

Kolaka Utara, sebagai salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, masih mengalami penurunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Pada tahun 2023, IKP Kabupaten Kolaka Utara berada di posisi 328 dengan skor 65,55% secara nasional dan peringkat 14 secara lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. Permasalahan ketersediaan pangan di Kabupaten Kolaka Utara semakin dipertegas oleh hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2022. Tercatat bahwa ketersediaan energi di daerah ini hanya sebesar 1.395 kkal/kapita/hari, angka yang jauh dari standar kecukupan harian sebesar 2.400 kkal/kapita/hari. Kondisi serupa terjadi pada aspek nutrisi, di mana ketersediaan protein hanya mencapai 49,18 gram/hari, belum memenuhi Angka Kecukupan Protein (AKP) yang disarankan sebesar 63 gram/hari (Kartono et al., 2012). Defisit ini dipicu oleh hampir seluruh komoditas pangan unggulan di Kabupaten Kolaka Utara yang mengalami kekurangan produksi secara sistemik. Dalam mengatasi tantangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan, bekerja sama dengan lembaga masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini diorganisasi dalam bentuk kelompok tani yang terlembaga secara formal.

Kebijakan ketahanan pangan cenderung berjalan lebih efektif apabila melibatkan partisipasi aktif kelompok tani sejak tahap perencanaan. Berbagai literatur mendukung pentingnya peran kelembagaan petani ini. Penelitian Nindi et al. (2024) menunjukkan bahwa kelompok tani memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. Sejalan dengan hal tersebut, Lumbantoruan dan Sihombing (2026) menemukan bahwa organisasi petani berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan input pertanian, seperti peralatan, pupuk, dan benih. Sementara itu, Sari et al. (2026) menyoroti peran strategis Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam perencanaan hingga pelaksanaan program berbasis pemanfaatan lahan pekarangan; anggota KWT tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga pengambil keputusan strategis yang terbukti mampu meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan bergizi di tingkat rumah tangga.

Dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan yang melibatkan kelembagaan kelompok tani, pemerintah daerah merancang kebijakan ketahanan berbasis data makro seperti Pola Pangan Harapan (PPH), Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*), dan panel harga yang digunakan mengidentifikasi keberhasilan ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Utara. Namun Kebijakan ketahanan pangan berbasis data makro sering kali gagal menyesuaikan diri dengan kebutuhan riil kelompok tani, sehingga program ketahanan pangan yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha bersama tidak selalu membuahkan hasil yang merata. Keterbatasan instrumen makro ini sejalan dengan temuan Perez-Escamilla (2024), yang menegaskan bahwa ukuran statistik makro tidak cukup untuk menangkap kompleksitas kondisi pangan di tingkat petani karena setiap pengukuran memerlukan penyesuaian konteks, sumber daya, dan horizon waktu

evaluasi. Fenomena tersebut diperkuat oleh Supendi (2022), yang menunjukkan bahwa indikator agregat nasional seperti data Sensus Pertanian maupun target swasembada jarang merespons kendala spesifik di lapangan. Ketidakselarasan ini semakin krusial karena kebijakan nasional cenderung berfokus pada pencapaian target produksi dan stabilitas harga secara makro, sembari mengabaikan dimensi sosial-ekonomi serta kelembagaan lokal (Amaruzaman et al., 2023). Pendekatan yang cenderung sentralistik dan seragam pada akhirnya melahirkan intervensi yang tidak responsif terhadap heterogenitas wilayah dan kebutuhan aktual kelompok tani (Zainab et al., 2026). Dampaknya, sebagaimana penelitian oleh Hariadi dan Perdana (2025), klaim statistik mengenai surplus produksi sering bertentangan dengan realitas rumah tangga petani yang masih menghadapi distribusi pendapatan yang tidak merata serta kerentanan gizi. Kesenjangan antara desain kebijakan dan realita lapangan ini kian diperlebar oleh faktor tata kelola, terbatasnya kapasitas institusi, skema insentif yang belum tepat, efektivitas penyuluhan, serta konteks sosial-ekonomi lokal (Ibrahim & Baqutayan, 2024). Meskipun keterbatasan instrumen makro dalam kebijakan ketahanan pangan telah banyak disoroti, studi terdahulu masih berfokus pada pencapaian agregat nasional atau makro daerah semata. Akibatnya, ketidakselarasan sering kali terjadi ketika kebijakan tersebut diturunkan ke tingkat kelompok tani. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana instrumen perencanaan kebijakan data makro sering kali meleset dari kebutuhan riil kelompok tani di tingkat tapak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara kebijakan berbasis data makro dengan kebutuhan riil kelompok tani dalam ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Studi kasus dipilih secara spesifik untuk menjelaskan fenomena kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa yang meliputi, Desa Katoi, Desa Raoda, dan Desa Ponggiha, pada bulan Agustus-November tahun 2025. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, berikut informan penelitian ini meliputi perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan Ketua Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani. Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen (Creswell & Poth, 2016). Wawancara mendalam dilakukan dengan partisipan penelitian menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Observasi dilakukan untuk mengamati fenomena dan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan ketahanan pangan di lapangan. Analisis dokumen meliputi kebijakan formal, instruksi, laporan kinerja, dokumentasi pribadi, dan dokumen relevan lainnya yang terkait dengan kebijakan. Analisis data meliputi tiga alur kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 2014). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menguji

validitas dan reliabilitas melalui empat tahapan validitas, yaitu: (1) triangulasi sumber data; (2) *member checking*; (3) deskripsi yang kaya dan detail; serta (4) klarifikasi bias penelitian. Adapun reliabilitas data dijaga dengan: (1) memastikan tidak ada kesalahan dalam hasil penelitian; dan (2) memastikan tidak terjadi perubahan makna kode selama proses pengkodean (Creswell & Creswell, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perencanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Utara, memulai perencanaan melalui penetapan tujuan yang bersifat strategis dan formal, yang ditetapkan melalui dokumen resmi seperti, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, dan Pola Pangan Harapan (PPH). Hal ini memberikan legitimasi dan arah yang jelas, berfokus pada swasembada pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk meningkatkan dan menjaga ketersediaan pangan maka Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan kerjasama skema *Government to Governance* dengan kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sumber daya pangan. Keterlibatan masyarakat ini diorganisasi dalam bentuk kelompok tani yang terlembaga secara formal, melalui sistem <https://simluh.pertanian.go.id>. Legitimasi formal ini memastikan kelompok tani berkedudukan sebagai mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan program strategis. Kelompok tani sebagai mitra strategis, menyusun proposal bantuan berdasarkan kebutuhan riil dan potensi sumber daya spesifik di wilayahnya. Berikut kebijakan berbasis data dan kebutuhan riil kelompok tani dalam ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Utara.

Tabel 1 Kebijakan Berbasis Data dan Kebutuhan Riil Kelompok Tani dalam Ketahanan Pangan di Kabupaten Kolaka Utara

No	Kebijakan Berbasis Data	Kebutuhan Riil Kelompok Tani	Program
1	Pola Pangan Harapan (PPH), mengoptimalkan penganekaragaman pangan di tingkat individu dan rumah tangga dengan skor 100%	Terpenuhi kebutuhan pangan harian pada tingkat rumah tangga dan peningkatan pendapatan rumah tangga.	Program Penganekaragaman Pangan Lestari (P2L)
2	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), mengatasi daerah yang mengalami kerentanan pangan prioritas 1, 2, dan 3	Peningkatan populasi ternak non ruminansia dan meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat.	Program Penanganan Kerawanan pangan
3	Panel Harga, mengidentifikasi pangan yang mengalami kenaikan	Bantuan pangan dengan nilai ekonomis tinggi dan	Program Pengembangan Bawang Merah

harga dan ketersediaan produksi pangan	mempermudah akses pasar.
---	-----------------------------

Sumber: Hasil Reduksi Data

Program Penganekaragaman Pangan Lestari (P2L)

Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT). Program ini merupakan bentuk pengakuan atas potensi perempuan dalam mempermudah akses pangan serta mewujudkan kemandirian pangan di tingkat individu dan rumah tangga. Langkah ini sejalan dengan penelitian Mataka et al. (2023) yang menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan di sektor pertanian terutama dalam pengambilan keputusan terkait produksi, nutrisi, dan pengendalian pendapatan secara signifikan mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Dalam operasionalnya, mengolah tiga area strategis yakni rumah bibit, demplot, dan pemanfaatan pekarangan untuk membudidayakan 12 jenis tanaman hortikultura, umbi-umbian, serta kacang-kacangan yang disesuaikan dengan karakteristik lahan lokal.

Kelembagaan kelompok wanita tani yang terlembaga secara formal, membentuk pola organisasi berbasis masyarakat (*community-based organizations/CBOs*). Keberadaan CBOs ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai saluran strategis untuk menyalurkan informasi pembangunan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat rumah tangga (Opore, 2007). Pendekatan berbasis komunitas ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta mendorong keberlanjutan program (Setyawibawa, 2026). Kendati demikian, implementasi Program Penganekaragaman Pangan Lestari (P2L) di lapangan masih menghadapi tantangan kinerja yang signifikan jika ditinjau dari kesesuaian antara data dan kebutuhan riil. Berdasarkan data Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2023, tingkat ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara baru mencapai 48,65%, yang mengindikasikan defisit konsumsi sebesar 51,35% dari target ideal. Kondisi ini dipertegas oleh rendahnya skor konsumsi kelompok sayur-sayuran yang baru mencapai 3,3 dari skor maksimal 30%.

Selain itu, dari aspek kesejahteraan ekonomi, tujuan peningkatan pendapatan rumah tangga petani melalui program ini belum tercapai secara optimal. Aktivitas budidaya yang dilakukan oleh KWT Mandiri saat ini belum berorientasi komersial, hasil panen umumnya hanya dikonsumsi sendiri atau dibagikan antaranggota tanpa diperjualbelikan. Alhasil, alokasi waktu dan tenaga yang dicurahkan anggota belum sebanding dengan dampak ekonomi bernilai tambah yang diperoleh. Oleh karena itu, arah kebijakan ketahanan pangan ke depan perlu diperluas tidak hanya berfokus pada teknis produksi dan diversifikasi pangan, tetapi juga menyasar penguatan nilai ekonomi serta pembukaan akses pasar bagi kelompok tani.

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Pengadaan kambing peranakan etawa adalah program penanganan kerawanan pangan yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan peningkatan produksi hasil peternakan khususnya terwujudnya

peningkatan populasi ternak ruminansia dan non ruminansia. Program ini tujuan untuk menyediakan kambing untuk dapat mewujudkan peningkatan produksi protein hewani hasil peternakan khususnya terwujudnya peningkatan populasi ternak non ruminansia. Ditinjau dari data statistik, populasi ternak kambing di Kabupaten Kolaka Utara masih mengalami penurunan drastis dari 5.878 ekor pada tahun 2022 menjadi hanya 2.984 ekor pada tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, penetapan tujuan dan sasaran program dilakukan secara terukur berdasarkan prioritas wilayah. Dinas Ketahanan Pangan memanfaatkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai landasan data makro untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien ke daerah-daerah yang paling rentan pangan. Efektivitas penargetan ini terlihat dari penetapan Desa Raoda di Kecamatan Lambai sebagai salah satu lokasi penerima bantuan, mengingat desa tersebut secara konsisten teridentifikasi berada pada status rentan pangan (Prioritas 2) sepanjang tahun 2023 hingga 2024.

Mengatasi kerentanan pangan pemerintah membentuk jaringan kolaborasi (*collaborative network*). Kolaborasi ini menjaring kelembagaan petani lokal mengingat mereka memiliki potensi yang besar dan pengetahuan yang memadai terkait problem di daerahnya (Alwi, 2022). Melalui skema ini, kelembagaan petani tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengambilan keputusan dan eksekusi di lapangan. Untuk menjamin efektivitas kolaborasi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan merancang kerja sama melalui kesepakatan formal dengan kelompok tani. Kelompok tani yang terlibat adalah mereka yang telah menyatakan kesediaan secara sukarela untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan program. Pendekatan kolaboratif ini terbukti mampu mendorong penyebaran praktik terbaik dan penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi pangan, yang pada akhirnya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi petani (Mudatsir et al., 2025).

Kendati demikian, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kendala mendasar pada tingkat penerima manfaat terkait pemenuhan kebutuhan riil kelompok tani. Peternak membutuhkan sumber pendapatan yang dapat dipenuhi dalam waktu relatif singkat untuk mencukupi kebutuhan harian masyarakat. Sementara itu, program budidaya ternak memerlukan alokasi waktu, tenaga, dan perawatan yang intensif seperti pencegahan penyakit dan ancaman hama, sehingga manfaat ekonomisnya tidak dapat dirasakan secara instan. Kondisi ini memicu kejenuhan pada peternak, yang pada akhirnya menurunkan intensitas serta durasi pemeliharaan ternak secara berkelanjutan. Penurunan intensitas kinerja kelompok tani mengakibatkan penurunan populasi ternak yang signifikan akibat angka kematian yang tinggi. Dari total bantuan di Desa Raoda sebanyak 34 ekor pada tahun 2024 dan 24 ekor pada tahun 2025, tercatat sebanyak 15 ekor kambing mati pada tahun 2024 dan 2 ekor pada tahun 2025. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah ternak yang tersisa dari hasil penyaluran hanya sebanyak 19 ekor untuk pengadaan tahun 2024 dan 22 ekor untuk tahun 2025.

Perbandingan antara kedua pendekatan ini memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan data makro dan realita pemenuhan kebutuhan peternak di tingkat mikro. Data makro FSVA berhasil memetakan di mana lokasi kerawanan pangan berada tetapi belum mampu memetakan apa bentuk intervensi yang paling relevan dengan kondisi sosial-ekonomi dan kapasitas harian kelompok tani. Akibatnya, meskipun penargetan wilayah dan penjaringan kelompok tani tergolong tepat secara administratif, efektivitas program di tingkat tapak mengalami kegagalan pada tingkat implementasi karena tidak selaras dengan kebutuhan riil peternak. Ketidaksesuaian ini terjadi lantaran pemerintah memfokuskan program pada budidaya kambing etawa yang berdampak jangka panjang dan membutuhkan perawatan intensif, padahal kelompok tani membutuhkan sumber pendapatan harian yang cepat untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka secara instan. Akibatnya, timbul kejenuhan dan penurunan motivasi pemeliharaan dari kelompok tani yang berujung pada tingginya angka kematian ternak serta gagalnya pencapaian target peningkatan populasi di lapangan. Oleh karena itu proses perencanaan program ke depan perlu menyelaraskan indikator data makro dengan asesmen kebutuhan riil berbasis partisipatif (*bottom-up*). Pemerintah daerah perlu melengkapi data FSVA dengan analisis kelayakan mata pencaharian dan kesiapan teknis kelompok tani sebelum menetapkan jenis bantuan.

Program Pengembangan Bawang Merah

Salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menekan laju inflasi daerah adalah mengoptimalkan budidaya tanaman hortikultura, khususnya komoditas bawang merah. Tingginya konsumsi masyarakat yang kerap memicu lonjakan harga di pasar menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Data Panel Harga Pangan menunjukkan pergerakan harga bawang merah yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun harga sempat mengalami penurunan menjadi Rp30.288 per kilogram pada tahun 2023, risiko lonjakan harga tetap mengintai sewaktu-waktu, terutama saat terjadi peningkatan permintaan pada momen-momen tertentu seperti bulan Ramadhan.

Guna mengantisipasi risiko kenaikan harga dan penurunan produksi, pemerintah daerah menerapkan skema pendelegasian mandiri (*regulated self-regulation*) yang dikemukakan oleh Sørensen dan Triantafyllou (2009), dengan memberikan otonomi kepada kelompok tani untuk menetapkan standar kinerja pengelolaan secara mandiri sesuai potensi sumber daya dan kompetensi lokal mereka. Pendekatan ini selaras dengan temuan Mudatsir et al. (2025), yang menegaskan bahwa pelibatan petani dalam pengambilan keputusan memungkinkan kelembagaan memastikan strategi yang diterapkan tetap relevan dan bermanfaat bagi kebutuhan spesifik kelompok tani. Pemberian ruang kelola ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga pasar, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan berbasis kompetensi, yang memungkinkan sektor domestik berkontribusi langsung sebagai solusi stabilitas ekonomi daerah. Antusiasme kelompok tani dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan ini turut didorong oleh tingginya insentif

ekonomis, mengingat budidaya bawang merah mampu memberikan keuntungan finansial yang menjanjikan dalam waktu yang relatif singkat.

Pendekatan tersebut terbukti memberikan hasil melimpah, dengan rata-rata produktivitas mencapai 7 hingga 12 ton per hektar untuk setiap periode tanam pada tahun 2024. Secara kumulatif, total produksi bawang merah di Kabupaten Kolaka Utara mengalami kenaikan signifikan sebesar 640 kuintal, yakni dari 334 kuintal pada tahun 2023 menjadi 974 kuintal pada tahun 2024. Kendati demikian, pencapaian dari sisi produksi ini masih diperhadapkan pada kendala tata niaga; terbatasnya akses pasar luar daerah menyebabkan penyerapan hasil panen bawang merah sejauh ini masih tertahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola rantai pasok melalui pembentukan kerjasama strategis dengan pembeli maupun pedagang antar-daerah dan regional. Langkah ini penting untuk menyerap surplus produksi harian kelompok tani agar hasil panen tidak tertahan di pasar lokal, sehingga harga di tingkat petani tetap stabil dan tidak anjlok saat panen raya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara perencanaan kebijakan berbasis data makro dan kebutuhan riil kelompok tani di Kabupaten Kolaka Utara. Penggunaan Instrumen data makro berhasil menentukan lokasi serta target intervensi secara presisi, tetapi belum mampu mengidentifikasi jenis bantuan yang sesuai dengan kapasitas teknis dan kebutuhan ekonomi petani. Ketidakselarasan ini terlihat pada Program P2L dan Program Penanganan Kerawanan Pangan, aktivitas produksi belum berorientasi komersial sehingga gagal meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kebutuhan insentif finansial jangka pendek. Sebaliknya, Program Bawang Merah yang menerapkan skema pendelegasian mandiri berhasil memicu antusiasme petani karena menyediakan insentif ekonomi yang cepat dan menjanjikan. Oleh karena itu, perencanaan program ke depan wajib mengintegrasikan analisis data makro dan asesmen kebutuhan riil berbasis partisipatif berkelanjutan.

REFERENCES

- Alwi. (2022). *Governance Dan Kebijakan Publik*. UPT Unhas Press.
- Amaruzaman, S., Bardsley, D. K., & Stringer, R. (2023). Analysing agricultural policy outcomes in the uplands of Indonesia: A multi-dimensional sustainability assessment. *Sustainable Development*, 31(3), 1937-1950. <https://doi.org/10.1002/sd.2494>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (Sixth Edition). SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Utara (2024). Neraca Bahan Makanan (NBM) Dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan Kabupaten Kolaka Utara.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Utara (2024). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024.
- Hariadi, U., & Putri Perdana. (2025). Ketahanan Pangan Indonesia: Antara Jargon Dan Realitas. *Jurnal Pertanian Agros*, 27(4), 418 – 430. <https://doi.org/10.37159/jpa.v27i4.139>
- Ibrahim, H. A., & Baqutayan, S. M. (2024). Assessing Agri-Food Policies for Food Security: A Systematic literature review of implementation performance and influencing factors. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 13(4). <https://doi.org/10.6007/ijarems/v13-i4/24108>
- Kartono, D., Hardinsyah, H., Jahari, A., Sulaeman, A., Astuti, M., Soekatri, M., & Riyadi, H. (2012). Ringkasan-angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan bagi orang Indonesia 2012. *Rumusan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X*, 20-21.
- Lumbantoruan, M. N., & Sihombing, R. S. M. (2026). Analisis Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Siharjulu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 6(1), 31-47. <https://doi.org/10.31004/innovative.v6i1.21389>
- Mataka, T., Kaitibie, S., & Ratna, N. N. (2023). Can women's empowerment in livestock farming improve household food security? Empirical evidence from rural households in Malawi. *Agriculture & Food Security*, 12(1), 35. <https://doi.org/10.1186/s40066-023-00436-2>
- Miles, M., & Huberman, A. (2014). *Qualitative Data Analysis* (2nd Ed.). London: SAGE Publications.
- Mudatsir, R., Bulkis, S., Jamil, M. H., & Rahmadanih. (2025). An examination of the mapping stakeholders in the institutional strengthening of maize farmers in Jenepono District, Indonesia. *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences*, 13(2):643-654. <https://doi.org/10.22194/jgias/25.1662>
- Nindi, K., Pellokila, M. R., & Ballo, F. W. (2024). Peran Kelompok Tani dalam Ketahanan Pangan Rumah Tangga: Studi Kasus Lumbung Pangan Desa Kamubheka Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 171-183. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5716>
- Opore, S. (2007). Strengthening community-based organizations for the challenges of rural development. *Community Development Journal*, 42(2), 251-264. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsl002>
- Perez-Escamilla, R. (2024). Food and nutrition security definitions,

- constructs, frameworks, measurements, and applications: global lessons. *Frontiers in Public Health*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1340149>
- Pransuamitra, P. A. (2023, May 16). Ketahanan Pangan RI di Bawah Rata-Rata Dunia, Begini Faktanya. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230516074542-128-437635/ketahanan-pangan-ri-di-bawah-rata-rata-dunia-begini-faktanya>
- Sari, C. R., Zahara, H., Fadli, F., Kembaren, E. T., Yusra, M., Yanto, N., & Rinaldi, R. (2026). Peran Kelompok Wanita Tani Terhadap Efektifitas Program P2L Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Aceh Utara. *agroteksos*, 36(1), 29-38. <https://doi.org/10.29303/agroteksos.v36i1.1585>
- Seftiyana, Y., & Alwi, G. S. (2024). Strategies for Strengthening Network Capacity in the Implementation of Food Security Policies at the Local Level in Indonesia. *South Eastern European Journal Of Public Health*, 943-949.
- Setyawibawa, R. A. (2026). TANTANGAN DISTRIBUSI DAN SOLUSI KOMUNITAS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 6(1), 557-571. <https://doi.org/10.46306/vls.v6i1.570>
- Sørensen, E., & Triantafillou, P. (2009). The politics of self-governance: an introduction. *The politics of self-governance*, 1(1).
- Supendi, S. (2022). Government strategic policy in agricultural development. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 23-29. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2543>
- Zainab, Z., Baharuddin, B., & Jalaluddin, J. (2026). Rural Agricultural Development and Farmer Empowerment in North Lombok Within The National Policy Framewor. *Jurnal Biologi Tropis*, 26(2), 580-586. <https://doi.org/10.29303/jbt.v26i2.11317>
- Zhang, W., Persoz, L., Hakiza, S., Biru, L., & Girmatsion, L. (2022). Impact of COVID-19 on food security in Ethiopia. *Epidemiologia*, 3(2), 161-178. <https://doi.org/10.3390/epidemiologia3020013>

Copyright Holder :

© Muh. Hilal Hamdi, Alwi, Dandi, Muhammad Ikbal Ali (2026).

First Publication Right :

© Abqary (*Journal of Law, Governance, and Sharia Studies*)

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>